



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021**

Tanjung Pati, Oktober 2021



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan tahun 2021;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
 - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2021.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD Tahun 2021.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ANDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dan juga dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam bentuk hasil kesepakatan-kesepakatan Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan perbaikan dari penjabaran Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Perubahan Renja selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan transportasi yang baik.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat dihargai sebagai pembelajaran (*learning proces*) untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan semoga yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Perangkat Daerah

Tanjung Pati, 23 September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	46
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian	7
Tabel II.2	Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	14
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	40
Tabel II.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota (Pokir)	45
Tabel III.1	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan. Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan dokumen Renja yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena mencakup perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih tinggi seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga kualitas penyusunan Renja akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat penggunanya.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja OPD adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh OPD yang berpedoman kepada RKPD. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja OPD adalah seluruhnya dipedomani dari RKPD, agar target kinerja Daerah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di OPD. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Maka dari itu disusun Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang mengacu dengan adanya perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 30 Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Dinas dalam melaksanakan tugas diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi inilah dilakukan penyusunan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini adalah untuk menyediakan dokumen perubahan rencana 2021 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 antara lain :

1. Sebagai landasan penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Perubahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021
3. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 |
| | Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| | Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB IV | PENUTUP |
| | Berisi uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 untuk mendapatkan target sasaran yang direncanakan dalam tahun berjalan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 .

Kondisi daerah yang masih menghadapi pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan mengalami keterhambatan pelaksanaan bahkan terjadi kebijakan realokasi dan alokasi pendanaan yang berdampak pada target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Terhadap Renja tahun 2021, dalam penyusunan Renja terjadi peralihan antara Permendagri 13 tahun 2006 tentang kode dan klasifikasi urusan pemerintah daerah dan organisasi dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana sebelumnya urusan pemerintahan mencakup Program dan Kegiatan, sementara pada peralihan Permendagri 90 Tahun 2019 urusan pemerintahan mencakup Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 11 Program dengan jumlah kegiatan yaitu sebanyak 42 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.897.819.566. Kemudian setelah dipetakan ke Nomenklatur berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 2 Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.954.322.780.

Jumlah program dan kegiatan dalam APBD Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.299.954.276. Kemudian dilakukan Refocusing Anggaran untuk penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang mengakibatkan adanya pergeseran anggaran. Jumlah Program dan Kegiatan tidak mengalami perubahan, 2 Program dan 15 Kegiatan, sedangkan Sub Kegiatan menjadi 38 yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

dengan anggaran yang di Refocussing menjadi Rp.0,-. Hal tersebut dikarenakan dana dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas/ penanganan Covid-19. Pada pergeseran anggaran tersebut jumlah pagu berkurang menjadi sebesar Rp. 17.272.185.840.

Realisasi capaian kinerja yang dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yaitu sebesar 35% dan realisasi keuangan sebesar 29%.

Untuk penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 serta perubahan yang terjadi setelah dilakukan refocusing anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)	
								TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		12.987.841.934	100%	11.929.767.068	100%	11.438.217.740
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)		67.780.000	85%	103.665.924	85%	85.432.500
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD yang dibuat (Laporan)	5	17.780.000	5	82.432.924	5	72.703.400
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah program yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan guna pelaksanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Program)	2	50.000.000	2	21.233.000	2	12.729.100
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan (%)		4.061.794.214	100%	4.162.637.751	100%	4.154.000.919
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	4.056.503.214	1	4.063.545.719	1	4.063.545.719
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Periode pelaksanaan jasa administrasi keuangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	0	0	12	93.263.232	12	86.958.000
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1	5.291.000	1	5.828.800	1	3.497.200
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)		350.000.000	100%	50.000.000	100%	25.000.000

KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)	
								TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2	15	01	2	05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Perlengkapan Pakaian Dinas (Sepatu Lars, Rompi, Jas, Senter) (Stel)	190	250.000.000	0	0	0	0
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	14	100.000.000	4	50.000.000	2	25.000.000
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		357.048.900	100%	314.780.900	100%	194.035.300
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	2.970.000	12	2.673.000	12	1.603.000
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	10.000.000	12	9.000.000	12	5.396.300
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Periode pelaksanaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	83.000.000	12	74.700.000	12	44.821.900
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	60.000.000	12	55.134.000	12	33.081.200
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	6.078.900	12	5.553.900	12	5.206.400
2	15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Periode penyediaan makan dan minum pegawai di Dishub guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	45.000.000	12	40.500.000	12	24.282.500
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Periode pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	150.000.000	12	127.220.000	12	79.644.000

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)		
							TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	500.000.000	0	0	0	0
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Unit)	3	500.000.000	0	0	0	0
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.027.410.000	100%	6.827.559.903	100%	6.820.388.667
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat seperti belanja perangko, materai dan benda pos (bulan)	12	5.000.000	12	3.620.000	12	2.170.000
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	6.600.000.000	12	6.464.403.167	12	6.464.403.167
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	17.000.000	12	14.240.000	12	8.520.000
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12	405.410.000	12	345.296.736	12	345.295.500
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik		623.808.820	100%	471.122.590	100%	159.360.354
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan)	12	214.938.820	12	265.600.590	12	159.360.354
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)	1	408.870.000	1	205.522.000	0	0
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan (%)	1%	8.966.480.846	1%	6.370.178.208	1%	5.833.968.100

KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPd 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)	
								TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
							Indeks kelancaran lalu lintas (Rasio)	0,53		0,53		0,53	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik		3.965.232.246	55%	989.264.664	60%	841.693.000
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (titik)	150	2.055.952.246	26	474.406.200	25	426.737.500
							Jumlah Wilayah Kecamatan yang dilakukan survey kebutuhan alat perlengkapan jalan (kecamatan)	5		5		5	
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU Solar Cell sebagai fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehabilitasi (Unit)		1.909.280.000	28	514.858.464	10	414.955.500
							Jumlah lampu PJU sebagai fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehabilitasi (Unit)	500		0		308	
							Jumlah rambu sebagai fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehabilitasi (Unit)	60		60		36	
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal		780.102.400	100%	669.986.864	100%	604.831.500
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Retribusi terminal yang didapatkan (Rp)	447.152.000	274.695.000	790.309.000	250.661.064	790.309.000	212.100.700
							Jumlah Sarana dan Prasaana yang dikembangkan	1		1		1	
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang tersedia dalam keadaan baik (unit)	1	505.407.400	1	419.325.800	1	392.730.800
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)		1.654.434.000	90%	1.710.227.732	93%	1.530.215.800

KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)	
								TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)	1	1.283.568.000	1	1.284.055.000	1	1.281.829.000
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	9		9	44.180.000	6	31.160.000
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan Blanko SKRD sebagai perlengkapan pengujian guna kelancaran pelaksanaan pengujian (Buku)	150	303.400.000	150	284.386.000	100	191.542.000
							Jumlah pengadaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (Smartcard) sebagai perlengkapan pengujian guna kelancaran pelaksanaan pengujian (Set)	8000		6.928		4.157	
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pendukung yang tersedia dalam keadaan baik dan standar (buah)	0	67.466.000	0	97.606.732	0	25.684.800
							Jumlah Alat Uji PKB yang tersedia dalam keadaan baik dan standar	9		9		9	
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota		2.228.312.200	100%	2.761.754.624	100%	2.690.445.200
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor kabupaten lima Puluh Kota (orang)	60	2.078.312.200	60	2.623.595.008	36	2.592.359.700
							Jumlah Titik rawan kecelakaan lalu lintas yang teratasi (Titik)	60		60		60	
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemanduan yang dilakukan guna perjalanan kepala daerah dan tamu tamu penting daerah (kali)	100	80.000.000	100	73.759.616	100	59.755.500
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan (kali)	4	70.000.000	4	64.400.000	1	38.330.000

KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)	
								TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana		111.000.000	100%	34.090.000	100%	21.228.200
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah awak kendaraan yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)	2	50.000.000	2	15.745.000	2	10.238.200
							Jumlah Juru Mudi/Supir yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)	20		20		20	
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Razia angkutan umum yang terlaksana (Kali)	12	61.000.000	4	18.345.000	4	10.990.000
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)		28.740.000	100%	19.081.400	100%	12.242.400
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sopir/juru mudi angkutan umum yang mengikuti penyuluhan (orang)	30	28.740.000	30	19.081.400	30	12.242.400
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota		91.720.000	100%	101.373.500	100%	59.888.000
2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei harian rata-rata (jalur)	0	40.000.000	4	81.948.500	4	46.973.000
							Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei load factor (jalur)	4		4		4	

KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2021		APBD 2021		APBD 2021 (PERGESERAN/REFOCUSING)	
								TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (orang)	1000	51.720.000	500	19.425.000	300	12.915.000
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		106.940.000	100%	84.399.424	100%	73.424.000
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pertimbangan teknis angkutan perkotaan (dokumen)	5	92.640.200	5	75.379.424	5	68.139.000
							Jumlah izin trayek angkutan pedesaan yang diterbitkan (buah)	12		12		12	
							Jumlah kartu kontrol perizinan yang dikeluarkan (lembar)	2500		2.500		2.500	
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah data perusahaan angkutan pedesaan (data)	4	14.299.800	4	9.020.000	4	5.285.000
							Jumlah data perusahaan angkutan perkotaan (data)	11		11		11	

Tabel II. 2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				31.277.6 34.235		62.866.9 91.980		17.272.1 85.840		2.329.2 21.520		3.864.06 0.875		0		0		6.193.2 82.395		69.060.2 74.375		220,8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	79,61	18.832.6 34.235	79,55	33.006.2 15.276	79,56	11.438.2 17.740	0	2.095.2 21.520	0	2.863.48 0.521	0	0	0	0	0	4.958.7 02.041	80	37.964.9 17.317	99,92	201,59
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5%	12.445.0 00.000	1%	29.860.7 76.704	1%	5.833.96 8.100	0	234.000 .000	0%	1.000.58 0.354	0%	0	0%	0	0%	1.234.5 80.354	0	31.095.3 57.058	20,00	249,86
		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)	5%	9.720.00 0.000	1%	27.719.0 05.510	1%	5.122.24 2.000	0	201.000 .000	0%	944.330. 458	0%	0	0%	0	0%	1.145.3 30.458	0	28.864.3 35.968	20,00	296,96
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	2.725.00 0.000	0,58	2.141.77 1.194	0,53	711.726. 100	0	33.000. 000	0	56.249.8 96	0	0	0	0	0	89.249. 896	1	2.231.02 1.090	116,00	81,87

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,61	18.832.634.235	79,55	33.006.215.276	79,56	11.438.217.740	0	2.095.221.520	0	2.863.480.521	0	0	0	0	0	4.958.702.041	80	37.964.917.317	99,92	201,59
Terwujudnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Darat		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)	5%	9.720.000.000	1%	27.719.005.510	1%	5.122.242.000	0	201.000.000	0%	944.330.458	0%	0	0%	0	0%	1.145.330.458	0	28.864.335.968	20,00	296,96
Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	2.725.000.000	0,58	2.141.771.194	0,53	711.726.100	0	33.000.000	0	56.249.896	0	0	0	0	0	89.249.896	1	2.231.021.090	116,00	81,87
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,61	18.832.634.235	79,55	33.006.215.276	79,56	11.438.217.740	0	2.095.221.520	0	2.863.480.521	0	0	0	0	0	4.958.702.041	80	37.964.917.317	99,92	201,59
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	5%	9.720.000.000	1%	27.719.005.510	1%	5.122.242.000	0	201.000.000	0%	944.330.458	0%	0	0%	0	0%	1.145.330.458	0	28.864.335.968	20,00	296,96
		Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	0,50	2.725.000.000	0,58	2.141.771.194	0,53	711.726.100	0	33.000.000	0	56.249.896	0	0	0	0	0	89.249.896	1	2.231.021.090	116,00	81,87

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terwujudnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Darat		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)	5%	9.720.000.000	1%	27.719.005.510	1%	5.122.242.000	0	201.000.000		944.330.458		0		0		1.145.330.458	0	28.864.335.968	20,00	296,96
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)	507	3.735.000.000	0	16.065.938.841		841.693.000	0	30.000.000	0	63.496.810	0	0	0	0	0	93.496.810	0	16.159.435.651	0,00	432,65
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			380.000.000		512.155.500											0	0	512.155.500		134,78	
		Jumlah Pengadaan Trotoar Jalan (KM)															0	0	0			
		Jumlah Traffic Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)																	0	0		
		Jumlah Warning Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)	1	280.000.000	4	238.401.500													4	238.401.500		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah halte/shalter yang terbangun dan berfungsi dengan baik (Unit)	1	100.000.000	7	273.754.000													7	273.754.000		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.920.000.000		10.324.256.600		426.737.500		0		0					0	0	0	10.324.256.600		353,57
		Jumlah wilayah kemacetan yang dilakukan survey kebutuhan alat perlengkapan jalan (kemacetan)	3	200.000.000	5	68.845.000	3									0	0	5	68.845.000			
		Jumlah marka yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (M2)	1000	450.000.000	1700	603.732.500										0	0	1.700	603.732.500			
		Jumlah pagar pengaman jalan (guadrill) yang terpasang yang berfungsi	300	300.000.000	200	350.013.900										0	0	200	350.013.900			

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
		dengan baik melalui pengadaan (M)																				
		Jumlah PJU yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (Titik)	150	1.200.000.000	870	8.729.070.700	26										0	0	870	8.729.070.700		
		Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)	20	350.000.000	20	164.915.500											0	0	20	164.915.500		
		Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)	70	220.000.000	449	407.679.000											0	0	449	407.679.000		
		Jumlah Papan Nama Jalan melalui															0	0	0	0		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		pengadaan (unit)																				
		Jumlah data kebutuhan perlengkapan jalan di pengalihan jalan nasional (data)															0	0	0	0		
		Jumlah cermin tikung yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)	10	200.000.000													0	0	0	0		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		7	85.000.000	330.966.650				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.966.650	0,00	389,37
		Jumlah Trotoar Jalan yang berfungsi dengan baik dengan adanya rehabilitas (KM)															0	0	0	0		
		Jumlah Traffic Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik dengan dilaksanakannya rehabilitas															0	0	0	0		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
		(unit)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Warning Light yang berfungsi dengan baik dengan dilaksanakannya rehab (unit)	7	85.000.000	15	330.966.650											0	0	15	330.966.650		
		Jumlah halte/shalter yang berfungsi baik dengan adanya rehab(Unit)															0	0	0	0		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang berfungsi dengan baik (unit)	500	350.000.000	4.898.560.091	414.955.500			30.000.000	63.496.810							0	93.496.810	0	4.992.056.901	0,00	1426,30
		- PJU	400	350.000.000	2215		31										0	0	2.215	0		
		- Rambu lalu lintas dan Rambu Portabel	100				36										0	0	0	0		
		- Warning Light			100												0	0	100	0		
		Materisasi (Paket)			2												0	0	2	0		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah pengadaan kendaraan khusus pemeliharaan PJU (Skylift) guna peningkatan fasilitas keselamatan jalan (unit)															0	0	0	0		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)		3.300.000.000		5.149.961.436		1.530.215.800	0	9.000.000		18.198.724		0		0		27.198.724	0	5.177.160.160		156,88
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)	1	2.900.000.000	8	3.524.344.750	1	1.281.829.000		0		0					0	0	8	3.524.344.750	800,00	121,53
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (orang)	6				6	31.160.000		0		0					0	0	0	0	0,00	0
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji		0	12	14.331.800		-		0							0	0	12	14.331.800		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kendaraan Bermotor	berkala yang teregistrasi (unit)																				
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pengujian Guna Kelancaran Pelaksanaan Pengujian (Set)		400.000.000		1.546.646.886		191.542.000		9.000.000		18.198.724				0	27.198.724		0		1.573.845.610	393,46
		Bukti Lulus Uji Elektronik (Smart Card) (Set)	2000		7500		4157									0	0		7.500		0	
		Kartu Induk (Buah)	1000													0	0		0		0	
		Blanko SKRD (Buku)	180		900		100									0	0		900		0	
		Kertas NCR (Buku)														0	0		0		0	
		Baju (Stel)			11											0	0		11		0	
		Sepatu (Pasang)			11											0	0		11		0	
		Sarung Tangan (Pasang)			11											0	0		11		0	
		Helm (Buah)			11											0	0		11		0	
		Masker (Buah)			11											0	0		11		0	
		Senter Kepala (Buah)														0	0		0		0	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan analisis potensi kendaraan bermotor wajib uji yang dianalisis (Laporan)															0	0	0	0		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian yang tersedia dalam keadaan nbaik dan standar (unit)		0	64.638.000	9	25.684.800										0	0	0	64.638.000		
		- kalibrasi (unit)	9														0	0	0	0		
		- akreditasi (unit)	1														0	0	0	0		
		- Alat Uji PKB (Unit)	9		64.638.000	9											0	0	9	64.638.000		
		- Alat Pendukung (Unit)	3														0	0	0	0		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)		2.610.000.000	6.398.046.133		2.690.445.200	0	162.000.000		862.634.924		0		0		1.024.634.924	0	7.422.681.057		284,39	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan			2.440.000.000	6.087.468.633		2.592.359.700		159.000.000		850.535.562						1.009.535.562	0	7.097.004.195		290,86	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
	Kabupaten/Kota		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor kabupaten lima Puluh Kota (Orang)	70	40.000.000	30	49.718.833	60				60						60	0	90	49.718.833		
		Jumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas di persimpangan yang teratasi (Titik)	40	2.400.000.000	40	5.855.484.800	60				60						60	0	100	5.855.484.800		
		Jumlah titik kemacetan yang teratasi (pasar dan sekolah (titik))			7	182.265.000											0	0	7	182.265.000		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemanduan yang dilakukan guna perjalanan kepala daerah dan tamu-tamu penting daerah (Kali)	100	90.000.000	386	252.803.000	100	59.755.500		3.000.000		12.099.362					0	15.099.362	386	267.902.362	386,00	297,67

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum LLAJ yang dilaksanakan (kali)	8	80.000.000	9	57.774.500	1	38.330.000		0		0			0	0	0	0	9	57.774.500	112,50	72,22
	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)		75.000.000	0	105.059.100		59.888.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	105.059.100		140,08
	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei harian rata-rata (jalur)				1.960.000	4	46.973.000		0		0				0	0	0	0	1.960.000		
	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah masyarakat dan siswa mengikuti sosialisasi/pe nyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (orang)		75.000.000		103.099.100	500	12.915.000		0		0				0	0	0	0	103.099.100		137,47
		Pelajar Tingkat SLTP/SLTA dan masyarakat (orang)	1000		2200	103.099.100	500									0	0	2.200	0	103.099.100		
Terwujudnya Kelancaran		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	2.725.000.000	0,58	2.141.771.194	0,53	711.726.100	0	33.000.000		56.249.896		0	0		89.249.896	1	2.231.021.090	116,00	81,87	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Lalu Lintas																						
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kelancaran Lalu Lintas		2.200.000.000		1.356.561.850		604.831.500	0	24.000.000		42.551.172		0		0		66.551.172	0	1.423.113.022		64,69
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya perencanaan DED Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			0	0		-								0	0	0	0			
		Jumlah DED (Dokumen)													0	0	0	0				
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Sarana dan Prasaana yang dikembangkan	1	2.000.000.000	1	1.227.041.850	1	212.100.700		24.000.000		42.551.172				0	66.551.172	1	1.293.593.022	100,00	64,68	
		Jumlah Lahan (Hektar)													0	0	0	0				
		Jumlah Kios dan Mushola (unit)													0	0	0	0				
		Jumlah Aspal Beton (m2)													0	0	0	0				
		Jumlah PJU (unit)													0	0	0	0				
		Jumlah retribusi terminal yang didapatkan (Rp)	Rp483336000		Rp1617591780	Rp1.227.041.850																
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang tersedia dalam keadaan baik (unit)	1	200.000.000	1	129.520.000	1	392.730.800		0		0			0	0	1	129.520.000	100,00	64,76		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Rabat Beton sedimen (m2)					20.26 3428 5714										0	0	0	0		
		Jumlah Bangunan Kios Yang diBangun (M3)					30										0	0	0	0		
		Jumlah Rabat Beton parkir (m2)					163.4 2347 8260 9										0	0	0	0		
		Jumlah Halte (unit)															0	0	0	0		
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)															0	0	0	0		
	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas		260.000.000		560.078.544		21.228.200	0	0		0		0		0	0	0	0		560.078.544	215,41
	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Juru mudi/awak kendaraan yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)		200.000.000		445.923.044		10.238.200		0		0				0	0	0	0		445.923.044	222,96

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		- Sopir (orang)	14		68	302.839.444	20								0	0	68	302.839.444				
		- Awak Teladan (Orang)	3		28	86.271.100	2								0	0	28	86.271.100				
		- Pengusaha/operator/teknis bengkel (orang)			83	56.812.500									0	0	83	56.812.500				
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Razia angkutan umum yang terlaksana (Kali)	12	60.000.000	28	114.155.500	4	10.990.000		0		0			0	0	28	114.155.500	233,33		190,26	
	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas		15.000.000		43.022.500		12.242.400	0	0		0		0	0	0	0	43.022.500			286,82	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sopir/jurumdi angkutan umum yang mengikuti penyuluhan (orang)	20	15.000.000	75	43.022.500	30	12.242.400		0		0					0	0	75	43.022.500	375,00	286,82
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0	250.000.000	0	182.108.300		73.424.000	0	9.000.000	0	13.698.724	0	0	0	0	0	22.698.724	0	204.807.024		81,92
	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	Jumlah perizinan yang dikeluarkan (lembar)		100.000.000		146.942.000		68.139.000		9.000.000		13.698.724					0	22.698.724	0	169.640.724		169,64

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	secara elektronik																					
		- Kartu Kontrol Izin Usaha(Lembar)	2500	70.000.000	4432		2500										0	0	4.432	0		
		- Dokumen Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan (Dokumen)					5										0	0	0	0		
		- Jumlah Dokumen Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Dokumen)															0	0	0	0		
		- Jumlah Dokumen pemberian Izin Insidentil (dokumen)			7												0	0	7	0		
		Jumlah izin trayek angkutan	12	30.000.000	0		12										0	0	0	0		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pedesaan yang diterbitkan (buah)																					
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota			150.000.000		35.166.300		5.285.000		0		0				0		0		0		35.166.300	23,44
		Jumlah data Perusahaan Angkutan Perkotaan (data)	12		8		11									0		0		8		0	
		Jumlah Data Persahaan Angkutan Perdesaan (data)	9		0		4									0		0		0		0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	79,61	18.832.634.235	79,55	33.006.215.276	79,56	11.438.217.740	0	2.095.221.520	0	2.863.480.521	0	0	0	0	0	4.958.702.041	80	37.964.917.317	99,92	201,59	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,61	18.832.634.235	79,55	33.006.215.276	79,56	11.438.217.740	0	2.095.221.520	0	2.863.480.521	0	0	0	0	4.958.702.041	80	37.964.917.317	99,92	201,59		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		150.652.000		85.621.000		85.432.500		9.000.000		13.698.724		0		0		0		0		22.698.724		0		108.319.724				71,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja OPD yang dibuat (Laporan)	5	25.652.000	24	85.621.000	5	72.703.400		9.000.000		13.698.724						0		22.698.724	24	108.319.724		480,00		422,27				
		LKjIP																0		0		0								
		LKPJ																0		0		0								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah program yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan guna pelaksanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan (program)	7	125.000.000			2	12.729.100		0		0						0		0		0				0		0,00	0,00	
	Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		12.100.000		36.232.000		4.154.009.919		600.515.052		1.237.822.412		0		0		0		1.838.337.464		0			1.874.569.464				15492,31	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)					1	4.063.545.719		588.515.052		1.219.524.326						0		1.808.039.378		0			1.808.039.378					

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)					12	86.958.000	3	12.000.000	2	18.298.086					5	30.298.086	5	30.298.086		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (laporan)	1	12.100.000	5	36.232.000	1	3.497.200		0		0					0	0	5	36.232.000	500,00	299,44
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		253.872.250		492.459.565		25.000.000		0		0		0		0	0	0	0	492.459.565	#DIV/0!	193,98
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya guna peningkatan disiplin aparaturnya (stel)		166.673.600		170.427.885											0	0	0	170.427.885		102,25
		PDH (Stel)	70	106.673.600	90	140.157.885											0	0	90	140.157.885		
		PDL (Stel)	60		73												0	0	73			
		Kelengkapan Pakaian Dinas Lainnya (Set)	155	60.000.000	25	30.270.000											0	0	25	30.270.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	14	87.198.650	60	322.031.680	4	25.000.000		0		0					0	0	60	322.031.680	428,57	369,31

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		210.314.940		1.596.890.896		194.035.300	0	0		59.485.055		0		0	0	59.485.055	0	1.656.375.951		787,57
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	3.267.000	60	14.354.500	12	1.603.000		0		0				0	0	60	14.354.500	500,00	439,38	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	16.335.000	60	28.950.500	12	5.396.300		0		0				0	0	60	28.950.500	500,00	177,23	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Periode pelaksanaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12	25.410.000	60	226.843.750	12	44.821.900		0		17.926.000				0	17.926.000	60	244.769.750	500,00	963,28	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	16.335.000	60	141.837.600	12	33.081.200		0		3.792.201					0	3.792.201	60	145.629.801	500,00	891,52
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	15.486.790	60	19.230.000	12	5.206.400		0		1.300.000					0	1.300.000	60	20.530.000	500,00	132,56
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periode penyediaan makan dan minum tamu guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	12.196.800	60	128.575.000	12	24.282.500		0		0					0	0	60	128.575.000	500,00	1054,17

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Periode pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	121.284.350	60	1.037.099.546	12	79.644.000		0	5	36.466.854					5	36.466.854	65	1.073.566.400	541,67	885,16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		1.297.100.000		1.361.379.820						0		0	0	0	0	0	0	1.361.379.820		104,96
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)	3	120.000.000	1	409.325.000				0							0	0	1	409.325.000	33,33	341,10
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mobiler guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)				227.538.000				0							0	0	0	227.538.000		
		Kursi Kerja(Unit)			32												0	0	32	0		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
		Kursi Rapat (Unit)			39												0	0	39	0		
		Kursi Kerja Kabid (Unit)			19												0	0	19	0		
		Kursi Tamu (Set)			0												0	0	0	0		
		Kursi Tunggu (Set)			0												0	0	0	0		
		Lemari Set (Unit)			5												0	0	5	0		
		Meja Sekat Kentor (Set)															0	0	0	0		
		Meja Kerja 1/2 Biro (Unit)			11												0	0	11	0		
		Meja biro (Unit)			1												0	0	1	0		
		Meja Rapat (Paket)			1												0	0	1	0		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun (unit)	3	1.140.000.000	1	388.480.000											0	0	1	388.480.000	33,33	34,08
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan prasarana/peralatan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)		37.100.000		336.036.820				0		0		0		0	0	0	0	336.036.820		905,76
		Infokus (unit)															0	0	0	0		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
		Komputer (unit)	2		18											0	0	18	0			
		Laptop (Unit)	1		9											0	0	9	0			
		UPS (Unit)	2		5											0	0	5	0			
		Hardisk (Unit)			1											0	0	1	0			
		Printer (Unit)	1		21											0	0	21	0			
		Speaker (Unit)			1											0	0	1	0			
		CCTV (unit)														0	0	0	0			
		HT (Unit)	6		6											0	0	6	0			
		Kamera (Unit)														0	0	0	0			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		16.543.920.855	240	27.847.189.684		6.820.388.667		1.475.579.968		1.525.474.830			0	0	0	3.001.054.798	240	30.848.244.482		186,46
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat seperti belanja perangko, materai dan benda pos (bulan)	12	3.630.000	60	20.435.000	12	2.170.000				860.000					0	860.000	60	21.295.000	500,00	586,64
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	16.008.315.565	60	25.919.276.659	12	6.464.403.167	3	1.424.939.968	2	1.447.363.124					5	2.872.303.092	65	28.791.579.751	541,67	179,85

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12.100.000	60	32.855.025	12	8.520.000		0		0					0	0	60	32.855.025	500,00	271,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pelaksanaan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	12	519.875.290	60	1.874.623.000	12	345.295.500	3	50.640.000	2	77.251.706					5	127.891.706	65	2.002.514.706	541,67	385,19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		364.674.190		1.586.442.311		159.360.354		10.126.500		26.999.500		0		0	0	37.126.000	0	1.623.568.311		445,21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional (bulan)	12	264.674.190	60	1.079.074.311	12	159.360.354	3	10.126.500		26.999.500					3	37.126.000	63	1.116.200.311	525,00	421,73
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100.000.000	4	507.368.000	1	-		0							0	0	4	507.368.000	400,00	507,37

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Untuk kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah belum mempunyai legalitas yang mendukung atau belum diaturnya petunjuk pelaksana atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang urusan Perhubungan. Belum adanya standar tentang layanan transportasi yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, maka dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Selanjutnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan disajikan dalam bentuk tabel dalam Tabel II. 3

Tabel II. 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	15	17
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan (%)	-	-	-	1	1	-	33	1	
2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	-	-	0,58	0,53	-	0,58	0,53	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	-	-	65	79,55	79,56	79,53	79,38	79,56	

Berdasarkan Tabel II. 2 Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan dan Indeks Kelancaran Lalu Lintas telah mencapai target dan terealisasi 100%. Sedangkan untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja inas Perhubungan tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari target 79,55 dan capaian 79,38 atau 99,78%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai mana yang menjadi tujuannya yaitu Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Untuk pencapaian ini telah dilaksanakan kegiatan strategis untuk menindaklanjuti hal yang kritis dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut :

- a. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah pada saat jam sibuk.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas, diantaranya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pengadaan rambu, Pengadaan Marka dan lainnya
- c. Sosialisasi tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan, untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sehingga terwujudnya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan wewenang di Bidang Perhubungan dengan fungsi :

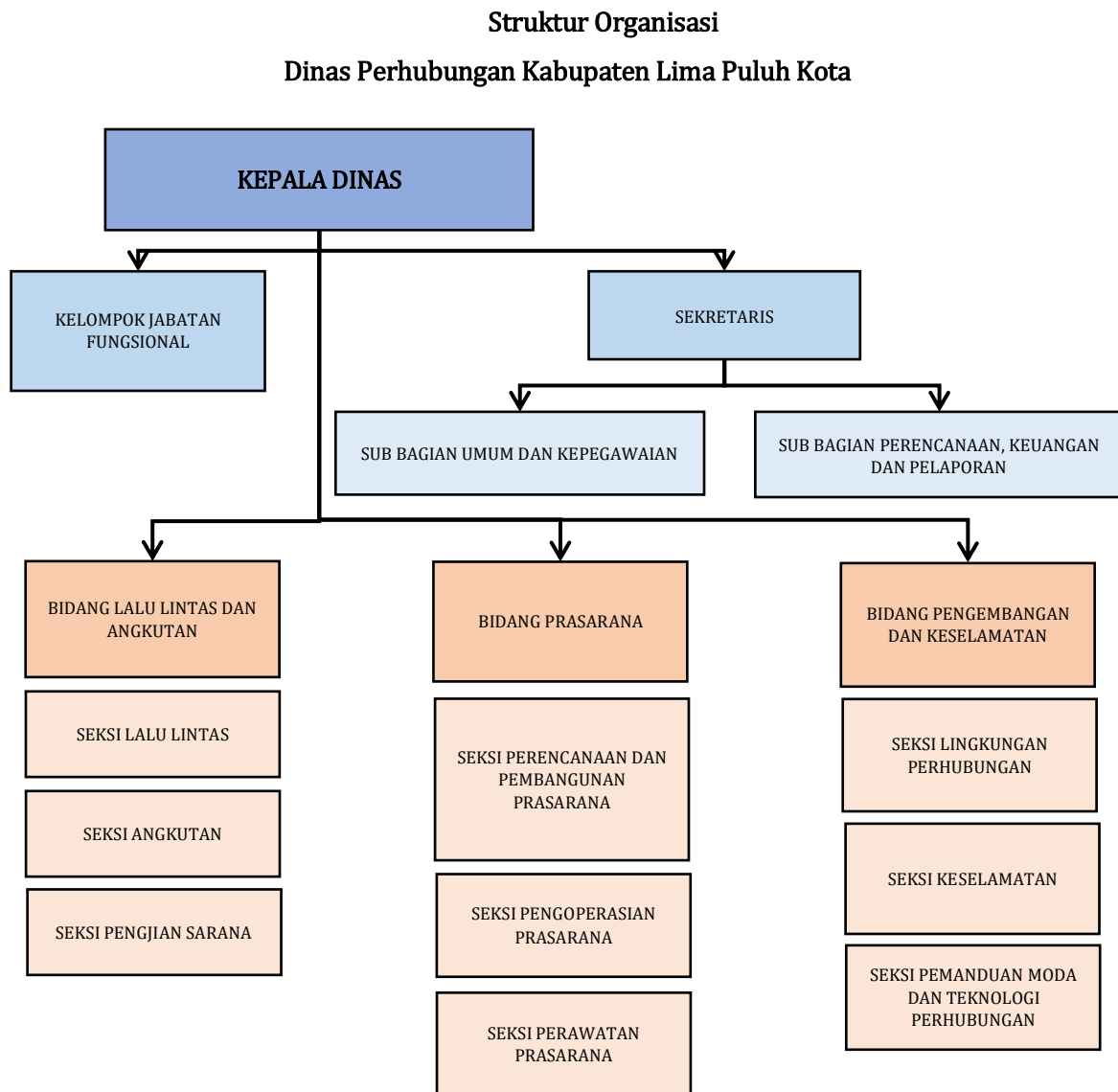
- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan dan perumusan program dan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kabupaten Lima Puluh Kota di Bidang Perhubungan;
- d. Pembinaan Teknis di Bidang Perhubungan;
- e. Pengawasan dan Pengendalian di Perhubungan;
- f. Penelitian di Bidang Perhubungan;
- g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan *search and rescue* di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;

3. Seksi Pengujian Sarana.
- d) Bidang Prasarana, membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 3. Seksi Perawatan Prasarana.
- e) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
1. Seksi Pengembangan dan Keselamatan;
 2. Seksi Pemanduan Moda Dan Teknologi Perhubungan;
 3. Seksi Keselamatan.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mengetahui Lebih jelas tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada struktur dibawah ini :



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

1. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan
2. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas
3. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan
4. Belum adanya kebijakan pemerintah dalam mengalihkan penetapan status jalan Nasional sehingga menyebabkan Kawasan Perkotaan (IKK) Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum tertata dan terkelola dengan baik
5. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
6. Belum memadainya angkutan umum yang melayani daerah-daerah terisolir pada wilayah Kabupaten.
7. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas
8. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
9. Lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
10. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi;

Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu pada misi 5 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong perumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”, dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan transportasi yang belum optimal, terpadu dan terintegrasi
2. Pelaksanaan sistem dan mekanisme transportasi yang belum efektif dan efisien

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan memperlihatkan tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan
 - a. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
 - b. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;
 - c. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal
2. Peluang
 - a. Letak geografis yang strategis;
 - b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah;

- c. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- d. Adanya potensi hubungan mutualisme dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

Dalam menyikapi isu-isu penting, rekomendasi dan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah
3. Membangun sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Melakukan pendataan dan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas dan parkir
6. Memiliki data yang *valid* dan *up to date*

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran pimpinan daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan.

Satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Perhubungan harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, tidak hanya memenuhi keinginan dan kepentingan satu kelompok lalu mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Aspirasi masyarakat tersebut diaspirasikan melalui Pokok Pikiran Pimpinan Daerah (Pokir). Berikut usulan program dan kegiatan Pokir pada **Tabel II.4.**

Tabel II.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten
Lima Puluh Kota (Pokir)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jorong Kobun	Jumlah PJU yang disediakan	5	Unit	Layak titik lokasi berada di jalan Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kawasan Wisata Harau	Jumlah PJU yang disediakan	11	Unit	Layak titik lokasi berada di jalan Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh	Jumlah PJU yang disediakan	9	Unit	Layak titik lokasi berada di jalan Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD.

Program dan kegiatan dalam APBD Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.299.954.276. Kemudian dilakukan Refocusing Anggaran untuk penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang mengakibatkan adanya pergeseran anggaran. Jumlah Program dan Kegiatan tidak mengalami perubahan, 2 Program dan 15 Kegiatan, sedangkan Sub Kegiatan menjadi 38. Sub Kegiatan mengalami pengurangan yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran yang di Refocussing menjadi Rp.0,-. Hal tersebut dikarenakan dana dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas/ penanganan Covid-19. Pada pergeseran anggaran tersebut jumlah pagu berkurang menjadi sebesar Rp. 17.272.185.840. Berikut Sub Kegiatan yang mengalami perubahan target capaian akibat *Refocusing* Anggaran :

- ✓ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota
- ✓ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
- ✓ Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Adapun mengenai uraian perubahan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, target kinerja dan pagu indikatif program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												18,299,945,276	17,272,185,840			25,240,738,534				
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												11,929,767,068	11,438,217,740			14,875,785,561			
2	1	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												103,665,924	85,432,500			77,947,000		
2	1	0	2.0	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja OPD yang di buat (laporan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	5 Laporan	5 Laporan	66 Nilai	66 Nilai	82,432,924	72,703,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20,447,000
2	1	0	2.0	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah program yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan guna pelaksanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (program)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Program	2 Program	66 Nilai	66 Nilai	21,233,000	12,729,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	57,500,000
2	1	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,162,637,751	4,154,000,919			5,137,284,846		
2	1	0	2.0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Tahun	1 Tahun	66 Nilai	66 Nilai	4,063,545,719	4,063,545,719	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,664,978,696
2	1	0	2.0	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa administrasi keuangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	93,263,232	86,958,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	466,221,500
2	1	0	2.0	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (laporan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Laporan	1 Laporan	66 Nilai	66 Nilai	5,828,800	3,497,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,084,650
2	1	0	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												50,000,000	25,000,000			287,500,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2150205	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian (PDH) guna peningkatan disiplin aparaturnya (stel)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	107 Stel	0 Stel	66 Nilai	66 Nilai		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	172,500,000	
2150509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (orang)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Orang	2 Orang	66 Nilai	66 Nilai	50,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	115,000,000	
21506	Administrasi Umum Perangkat Daerah												314,780,900	194,035,300			410,606,235	
2150601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	2,673,000	1,603,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,415,500	
2150602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	9,000,000	5,396,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,500,000	
2150604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	74,700,000	44,821,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	95,450,000	
2150605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	55,134,000	33,081,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	69,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	5,553,900	5,206,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,990,735	
215168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode penyediaan makan dan minum pegawai di Dishub guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	40,500,000	24,282,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	51,750,000	
215169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	127,220,000	79,644,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	172,500,000	
21517	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				575,000,000	
215172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Unit	0 Unit	66 Nilai	66 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	575,000,000	
21518	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											6,827,559,903	6,820,388,667				7,891,780,000	
215181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat seperti belanja perangko, materai dan benda pos (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	3,620,000	2,170,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,750,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
25182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	6,464,403,167	6,464,403,167	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,590,000,000			
25183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	14,240,000	8,520,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	19,550,000			
25184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	345,296,736	345,295,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	276,480,000			
2519	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											471,122,590	159,360,354			495,667,480				
25192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional (bulan) Periode pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	66 Nilai	66 Nilai	265,600,590	159,360,354	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25,466,980			
25199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Unit	1 Unit	66 Nilai	66 Nilai	205,522,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	470,200,500			
252	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											6,370,178,208	5,833,968,100			10,364,952,973				
2522	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											989,264,664	841,693,000			4,560,017,083				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2152202	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah PJU yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (Titik) Jumlah Wilayah Kecamatan yang dilakukan survey kebutuhan alat perlengkapan jalan (Kecamatan)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.53 Indeks 3,13 Rasio	26 Titik 5 Kecamatan	25 Titik 5 Kecamatan	0.01 %	0.01 %	474,406,200	426,737,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 3,13 Rasio	2,364,345,083	
2152204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah lampu PJU sebagai fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehabilitasi Jumlah PJU Solar Cell sebagai fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehabilitasi Jumlah rambu sebagai fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehabilitasi	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.53 Indeks 3,13 Rasio	60 Unit 1 Unit 31 Unit	308 Unit 10 Unit 36 Unit	0.01 %	0.01 %	514,858,464	414,955,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 3,13 Rasio	2,195,672,000	
21523	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											669,986,864	604,831,500			897,117,760		
2152302	Pembangunan Gedung Terminal	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Retribusi terminal yang didapatkan (Rp) Jumlah Sarana dan Prasaana yang dikembangkan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.53 Indeks 3,13 0 Indeks Kelancaran Lalu Lintas 0.53 Rasio	790309000 Rp 1 Unit	790309000 Rp 1 Unit	0.53 Rasio	0.53 Rasio	250,661,064	212,100,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 3,13 0 Indeks Kelancaran Lalu Lintas 0.53 Rasio	315,899,250	
2152304	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah terminal yang tersedia dalam keadaan baik (unit)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.53 Indeks 3,13 0 Indeks Kelancaran Lalu Lintas 0.53 Rasio	1 Unit	1 Unit	0.53 Rasio	0.53 Rasio	419,325,800	392,730,800		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 3,13 0 Indeks Kelancaran Lalu Lintas 0.53 Rasio	581,218,510	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215025	2.001	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												1,710,227,732	1,530,215,800			1,952,599,100
215025	2.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	1 Unit	1 Unit	0.01 %	0.01 %	1,284,055,000	1,281,829,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	1,476,103,200
215025	2.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Orang)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	6 Orang	6 Orang	0.01 %	0.01 %	44,180,000	31,160,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	50,000,000
215025	2.004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Pengadaan Blanko SKRD sebagai Perlengkapan Pengujian Guna Kelancaran Pelaksanaan Pengujian (Buku) Jumlah Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Smart Card) sebagai Perlengkapan Pengujian Guna Kelancaran Pelaksanaan Pengujian (Set)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	178 Buku 7500 Set	100 Buku 4157 Set	0.01 %	0.01 %	284,386,000	191,542,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	348,910,000
215025	2.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah alat pendukung yang tersedia dalam keadaan baik dan standar (Unit) Jumlah alat uji PKB yang tersedia dalam keadaan baik dan standar (Unit)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	0 Unit 9 Unit	0 Unit 9 Unit	0.01 %	0.01 %	97,606,732	25,684,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	77,585,900
215026	2.006	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												2,761,754,624	2,690,445,200			2,562,559,030

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215261	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor kabupaten lima Puluh Kota (orang) Jumlah Titik rawan kecelakaan lalu lintas yang teratasi (Titik)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	60 Orang 60 Titik	36 Orang 60 Titik	0,53 Rasio 0,01 %	0,53 Rasio	2,623,595,008	2,592,359,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	2,390,059,030	
215264	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah pemanduan yang dilakukan guna perjalanan kepala daerah dan tamu tamu penting daerah (kali)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	100 Kali	100 Kali	0,53 Rasio 0,01 %	0,53 Rasio	73,759,616	59,755,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	92,000,000	
215265	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Forum LLAJ yang dilaksanakan (kali)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	4 Kali	1 Kali	0,53 Rasio 0,01 %	0,53 Rasio	64,400,000	38,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	80,500,000	
21528	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan											34,090,000	21,228,200			131,150,000		
215284	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0 Jumlah awak kendaraan yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang) Jumlah juru mudi/ sopir yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	12 Kali 2 Orang 20 Orang	00 2 Orang 20 Orang	0,01 %	0,01 %	15,745,000	10,238,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	70,150,000	
215285	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Razia angkutan umum yang terlaksana (Kali)	Persentase menurunnya angka kecelakaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	4 Kali	4 Kali	0,01 %	0,01 %	18,345,000	10,990,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	61,000,000	
21520	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											19,081,400	12,242,400			33,051,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215202	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah sopir/juru mudi angkutan umum yang mengikuti penyuluhan (orang)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	30 Orang	30 Orang	0,53 Rasio	0,53 Rasio	19,081,400	12,242,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	33,051,000	
21522	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											101,373,500	59,888,000		105,478,000			
21522	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei harian rata-rata (jalur) Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei load factor (jalur)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	4 Jalur 4 Jalur	4 Jalur 4 Jalur	0,53 Rasio	0,53 Rasio	81,948,500	46,973,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	46,000,000	
21522	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (orang)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	500 Orang	300 Orang	0,53 Rasio	0,53 Rasio	19,425,000	12,915,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	59,478,000	
21524	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											84,399,424	73,424,000		122,981,000			
21524	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan (Dokumen) Jumlah izin trayek angkutan pedesaan yang diterbitkan (buah) Jumlah kartu kontrol perizinan yang di keluarkan (lembar)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,53 Indeks 3,13 Rasio	5 Dokumen 12 Buah 2500 Lembar	5 Dokumen 12 Buah 2500 Lembar	0,53 Rasio	0,53 Rasio	75,379,424	68,139,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 3,13 Rasio	106,536,230	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
210242	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Data Persahaan Angkutan Perdesaan Jumlah data Perusahaan Angkutan Perkotaan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.53 Indeks 3,13 Rasio	4 Data 11 Data	4 Data 11 Data	0.53 Rasio	0.53 Rasio	9,020,000	5,285,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 3,13 Rasio	16,444,770			
TOTAL												18,299,945,276	17,272,185,840			50,488,209,731				

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah rencana kerja tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja dapat dilakukan perubahan di tahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen Renja yang telah diatur didalam Permendagri tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka perubahan Renja Tahun 2021 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, pedoman bagi perubahan perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta pedoman bagi stakeholder lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2021.

Berkaitan dengan hal diatas serta untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pada tahun 2021 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan pedoman bagi perubahan perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
3. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta jika diperlukan melakukan perbaikanperbaikan yang diperlukan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping beberapa kaidah yang dirumuskan diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2021, maka diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya, termasuk dukungan dari lembaga, masyarakat, serta seluruh *stakeholders* yang berkepentingan.